



**PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
PERUBAHAN APBD
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Lampiran : Nota Kesepakatan
Nomor : 06/KP/2019
910/7406
Tanggal : 22 Juli 2019



**PROVINSI SUMATERA UTARA
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nomor : 06/KP/2019
910/7406
Tanggal : 22 Juli 2019

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : EDY RAHMAYADI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.30 Medan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. a. Nama : H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- b. Nama : RUBEN TARIGAN, SE
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- c. Nama : H. T. MILWAN
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- d. Nama : SRI KUMALA, SE, MM
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan
- e. Nama : ADUHOT SIMAMORA
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No.5 Medan

sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P.APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P.APBD Tahun Anggaran 2019 yang disepakati bersama antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Rancangan P.APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Kebijakan Umum P.APBD Tahun Anggaran 2019, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara P.APBD Tahun Anggaran 2019 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, Program dan Kegiatan serta Belanja Tidak Langsung pada P.APBD Tahun Anggaran 2019.

Program dan kegiatan serta pagu anggaran yang tertuang dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P.APBD Tahun Anggaran 2019 ini dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pembahasan antara DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P.APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan P.APBD Tahun Anggaran 2019.

Medan, 22 Juli 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA

selaku,

PIHAK PERTAMA



EDY RAHMAYADI

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

selaku,

PIHAK KEDUA



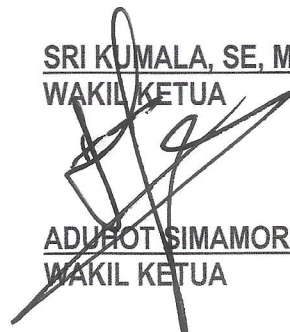
**H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos
KETUA**

**RUBEN TARIGAN, SE
WAKIL KETUA**

**H. T. MILWAN
WAKIL KETUA**

**SRI KUMALA, SE, MM
WAKIL KETUA**

**ADUFOT SIMAMORA
WAKIL KETUA**



DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
BAB I : PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS-P.....	I - 2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS-P	I - 3
BAB II : RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	II - 1
BAB III : PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD TA. 2019	III - 1
BAB IV : PENUTUP	IV - 1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD disusun sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum Perubahan APBD yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD. PPAS-P APBD antara lain mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh masing-masing Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah selaras dengan prioritas program nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Selain hal tersebut, PPAS-P APBD juga menggambarkan pagu anggaran sementara pada rincian belanja tidak langsung dan belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD.

Rancangan PPAS Perubahan (PPAS-P) APBD ini disampaikan secara bersamaan dengan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD untuk dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disepakati sebagai acuan dalam penyusunan P.APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019. Kedua dokumen tersebut akan menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD).

PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai kerangka prioritas dan plafon anggaran sementara dan dokumen yang mengatur rincian alokasi anggaran, oleh karena itu PPAS-P APBD disusun untuk mengimplementasikan perubahan kebijakan yang tertuang dalam Kebijakan

Umum Perubahan APBD berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah.

Dalam rancangan PPAS-P APBD disajikan secara lengkap penjelasan mengenai program/kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan dan kemampuan keuangan daerah, capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus direvisi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, dan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

I.2 Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan

Tujuan Penyusunan PPAS-P APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berjalan apabila melampaui asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
2. Melakukan pengurangan/penambahan terhadap capaian target kinerja program kegiatan apabila asumsi KUA sebelumnya tidak tercapai/terlampaui;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019.

I.3 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019.

BAB II

**RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAN
PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

Asumsi dasar kebijakan perubahan pendapatan daerah yang tertuang dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 secara umum mengalami perubahan pada komponen pendapatan serta pembiayaan daerah. Perubahan pendapatan diperkirakan berkurang sebesar Rp.1.298.413.172.616,00 dari target semula sebesar Rp.15.327.752.517.586,00 menjadi Rp. 14.029.339.344.970,00 atau berkurang sebesar 8,47 persen, dimana hal ini disebabkan oleh karena adanya beberapa komponen yang tidak sesuai dengan asumsi target sebelumnya. Adapun rincian perubahan pendapatan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Perubahan Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)	Bertambah/Berkurang (Rp.)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.583.849.754.886,00	6.284.220.582.270,00	(1.299.629.172.616,00)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.087.369.133.968,00	5.171.010.378.283,00	(916.358.755.685,00)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	36.744.959.900,00	39.126.339.000,00	2.381.379.100,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	612.177.474.033,00	515.021.784.768,00	(97.155.689.265,00)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	847.558.186.985,00	559.062.080.219,00	(288.496.106.766,00)
1.2	DANA PERIMBANGAN	7.736.050.762.700,00	7.736.050.762.700,00	-
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	550.587.677.700,00	550.587.677.700,00	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	2.713.750.553.000,00	2.713.750.553.000,00	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	4.471.712.532.000,00	4.471.712.532.000,00	-
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.852.000.000,00	9.068.000.000,00	1.216.000.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	7.852.000.000,00	9.068.000.000,00	1.216.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	15.327.752.517.586,00	14.029.339.344.970,00	(1.298.413.172.616,00)

Tabel 2.2
Perubahan Rincian Pendapatan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019

Uraian	Sebelum	Menjadi	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4 (3-2)
PENDAPATAN	15.327.752.517.586,00	14.029.339.344.970,00	(1.298.413.172.616,00)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.583.849.754.886,00	6.284.220.582.270,00	(1.299.629.172.616,00)
Pendapatan Pajak Daerah	6.087.369.133.968,00	5.171.010.378.283,00	(916.358.755.685,00)
Pajak Kendaraan Bermotor	1.930.647.732.000,00	1.986.414.422.977,00	55.766.690.977,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.301.034.474.000,00	1.404.009.027.338,00	102.974.553.338,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	830.000.000.000,00	865.000.000.000,00	35.000.000.000,00
Pajak Air Permukaan	1.150.500.000.000,00	40.400.000.000,00	(1.110.100.000.000,00)
Pajak Rokok	875.186.927.968,00	875.186.927.968,00	0,00
Hasil Retribusi Daerah	36.744.959.900,00	39.126.339.000,00	2.381.379.100,00
Retribusi Jasa Umum	23.172.784.900,00	25.003.651.000,00	1.830.866.100,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan	22.449.061.900,00	24.359.151.000,00	1.910.089.100,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	220.000.000,00	303.000.000,00	83.000.000,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan	200.000.000,00	21.500.000,00	(178.500.000,00)
Retribusi Pengujian Mutu Barang	303.723.000,00	320.000.000,00	16.277.000,00
Retribusi Jasa Usaha	10.472.175.000,00	10.298.112.000,00	(174.063.000,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.924.704.000,00	3.457.134.000,00	(467.570.000,00)
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa	2.728.971.000,00	2.792.521.000,00	63.550.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi	80.000.000,00	109.752.000,00	29.752.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	1.200.000.000,00	1.260.000.000,00	60.000.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.538.500.000,00	2.678.705.000,00	140.205.000,00
Retribusi Perizinan Tertentu	3.100.000.000,00	3.824.576.000,00	724.576.000,00
Retribusi Pemberian Izin Trayek	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Retribusi Pemberian Izin Usaha Perikanan	1.200.000.000,00	1.250.000.000,00	50.000.000,00
Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	0,00	0,00	0,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan TKA	1.600.000.000,00	2.274.576.000,00	674.576.000,00

Uraian	Sebelum	Menjadi	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4 (3-2)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	612.177.474.033,00	515.021.784.768,00	(97.155.689.265,00)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	610.868.168.141,00	511.032.898.000,00	(99.835.270.141,00)
PT. Perkebunan Sumatera Utara	22.000.000.000,00	2.706.000.000,00	(19.294.000.000,00)
PT. Bank Sumut	566.703.753.000,00	482.236.898.000,00	(84.466.855.000,00)
PT. Dhirga Surya Sumatera Utara	400.000.000,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)
PD. Aneka Industri dan Jasa	0,00	0,00	0,00
PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara	1.764.415.141,00	300.000.000,00	(1.464.415.141,00)
PDAM Tirtanadi	20.000.000.000,00	25.590.000.000,00	5.590.000.000,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN	1.309.305.892,00	3.988.886.768,00	2.679.580.876,00
PT. Kawasan Industri Medan	1.085.890.947,00	3.819.291.087,00	2.733.400.140,00
PT. Asuransi Bangun Askrida	223.414.945,00	169.595.681,00	(53.819.264,00)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	847.558.186.985,00	559.062.080.219,00	(288.496.106.766,00)
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	65.032.000,00	50.000.000,00	(15.032.000,00)
Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	0,00	0,00
Penjualan Bahan-Bahan Bekas Bangunan	65.032.000,00	50.000.000,00	(15.032.000,00)
Penerimaan Jasa Giro	69.099.556.866,00	69.099.556.866,00	0,00
Jasa Giro Kas Daerah	69.099.556.866,00	69.099.556.866,00	0,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00
Bidang Pekerjaan Umum	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00

Uraian	Sebelum	Menjadi	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4 (3-2)
Pendapatan Denda Pajak	661.319.503.762,00	376.242.683.653,00	(285.076.820.109,00)
Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	44.659.476.173,00	369.482.656.064,00	324.823.179.891,00
Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.110.027.589,00	6.610.027.589,00	4.500.000.000,00
Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	614.550.000.000,00	150.000.000,00	(614.400.000.000,00)
Pendapatan Dari Pengembalian	35.184.433.357,00	42.870.000.000,00	7.685.566.643,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.120.000.000,00	1.120.000.000,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana BOS	1.200.000.000,00	1.500.000.000,00	300.000.000,00
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana Hibah	3.114.433.357,00	10.500.000.000,00	7.385.566.643,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana UP/GU/TU/LS	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	51.000.000,00	136.619.700,00	85.619.700,00
Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
Angsuran/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah	1.000.000,00	36.619.700,00	35.619.700,00
Pendapatan BLUD	64.000.000.000,00	57.600.000.000,00	(6.400.000.000,00)
Rumah Sakit Umum Haji Medan Provsu	64.000.000.000,00	57.600.000.000,00	(6.400.000.000,00)
Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat	7.838.661.000,00	3.063.220.000,00	(4.775.441.000,00)
Pendapatan Penyelenggaraan Diklat	7.838.661.000,00	3.063.220.000,00	(4.775.441.000,00)

Uraian	Sebelum	Menjadi	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4 (3-2)
DANA PERIMBANGAN	7.736.050.762.700,00	7.736.050.762.700,00	0,00
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	550.587.677.700,00	550.587.677.700,00	0,00
Bagi Hasil Pajak	467.407.683.700,00	467.407.683.700,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	134.404.425.000,00	134.404.425.000,00	0,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh 21	327.401.800.000,00	327.401.800.000,00	0,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	5.601.458.700,00	5.601.458.700,00	0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	83.179.994.000,00	83.179.994.000,00	0,00
DBH SDA Minyak Bumi dan Gas	3.621.665.000,00	3.621.665.000,00	0,00
DBH SDA Mineral dan Batubara	56.935.878.000,00	56.935.878.000,00	0,00
DBH SDA Kehutanan	21.695.614.000,00	21.695.614.000,00	0,00
DBH SDA Panas Bumi	926.837.000,00	926.837.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum	2.713.750.553.000,00	2.713.750.553.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum	2.713.750.553.000,00	2.713.750.553.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus	4.471.712.532.000,00	4.471.712.532.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	390.619.136.000,00	390.619.136.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	4.081.093.396.000,00	4.081.093.396.000,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.852.000.000,00	9.068.000.000,00	1.216.000.000,00
Pendapatan Hibah	7.852.000.000,00	9.068.000.000,00	1.216.000.000,00
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	5.352.000.000,00	5.568.000.000,00	216.000.000,00
Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	5.352.000.000,00	5.568.000.000,00	216.000.000,00
Pendapatan Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	2.500.000.000,00	3.500.000.000,00	1.000.000.000,00
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat	2.500.000.000,00	3.500.000.000,00	1.000.000.000,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 mengalami perubahan, dimana sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bahwa SiLPA Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.981.167.561.436,19 sedangkan pada APBD Tahun Anggaran 2019 SiLPA dicantumkan sebesar Rp.500.000.000.000,00 sehingga diperoleh sisa yang belum dianggarkan sebesar Rp.481.167.561.436,19 yang nantinya akan menutupi defisit anggaran.

Terhadap pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.283.844.753.000,00 yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal kepada PT. Bank Sumut.

Rincian perubahan pembiayaan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Perubahan Pembiayaan Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Semula	Menjadi	Bertambah/Berkurang
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	PEMBIAYAAN DAERAH			
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	500.000.000.000,00	981.167.561.436,19	481.167.561.436,19
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	500.000.000.000,00	981.167.561.436,19	481.167.561.436,19
1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-
1.3	Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-
1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-
1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	283.844.753.000,00	283.844.753.000,00	-
2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-
2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	283.844.753.000,00	283.844.753.000,00	-
2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-
2.4	Pembentukan pinjaman daerah	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	216.155.247.000,00	697.322.808.436,19	481.167.561.436,19

BAB III

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan merupakan dokumen yang mengatur rincian alokasi anggaran yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP-PD). PPAS Perubahan APBD disusun untuk mengimplementasikan Kebijakan Umum Perubahan APBD dengan klasifikasi urusan pemerintahan daerah. Bidang urusan wajib Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara terdiri dari **urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar** yang dalam implementasi klasifikasi belanjanya dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Perangkat Daerah, **urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar** yang dalam implementasi klasifikasi belanjanya dilaksanakan oleh 14 (empat belas) Perangkat Daerah.

Disamping urusan wajib, terdapat juga bidang urusan pilihan Pemerintahan Daerah yaitu urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bidang urusan pilihan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara implementasinya dilaksanakan oleh 6 (enam) Perangkat Daerah dan penunjang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh 11 (sebelas) Perangkat Daerah.

Secara garis besar prioritas pembangunan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 tidak mengalami perubahan. Penentuan plafon anggaran perubahan dilakukan berdasarkan skala prioritas dan perubahan kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal daerah). Program dan kegiatan pada belanja langsung diarahkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan kebijakan belanja pada Perubahan APBD Tahun 2019 terjadi pada komponen Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah menjadi sebesar Rp.10.088.596.399.007,00 berkurang sebesar Rp. 377.669.430.753,84 dari yang dianggarkan semula yang sebesar Rp. 10.466.265.829.760,90

Sedangkan pada komponen Belanja Langsung menjadi sebesar Rp.4.638.065.754.399,18 mengalami pengurangan sebesar Rp.439.576.180.425,97 dari yang dianggarkan semula sebesar Rp. 5.077.641.934.825,14 hal ini mengakibatkan terjadinya pengurangan belanja langsung pada program/kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 serta mengakibatkan penyesuaian capaian target tahun 2019 pada beberapa Perangkat Daerah.

Perubahan belanja daerah per Organisasi Perangkat Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Plafon Anggaran Belanja Perangkat Daerah
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.457.922.842.649,47	2.477.310.584.185,75	2.980.612.258.463,72
1.01	Pendidikan	3.397.669.611.568,33	1.971.655.182.644,33	1.426.014.428.924,00
1.01.01	Dinas Pendidikan	3.397.669.611.568,33	1.971.655.182.644,33	1.426.014.428.924,00
1.02	Kesehatan	527.053.638.522,00	176.862.258.407,00	350.191.380.115,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	373.014.784.501,00	135.480.684.696,00	237.534.099.805,00
1.02.02	Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. M. Ildrem	63.718.366.849,00	41.381.573.711,00	22.336.793.138,00
1.02.03	Rumah Sakit Haji Medan	90.320.487.172,00	-	90.320.487.172,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.187.135.421.187,72	204.319.554.045,00	982.815.867.142,72
1.03.01	Dinas Bina Marga dan Bina Kostruksi	780.135.526.207,76	82.719.833.605,00	697.415.692.602,76
1.03.02	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang	406.999.894.979,96	121.599.720.440,00	285.400.174.539,96
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	141.150.715.414,62	19.488.181.667,62	121.662.533.747,00
1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	141.150.715.414,62	19.488.181.667,62	121.662.533.747,00

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	98.250.916.896,00	36.371.888.381,00	61.879.028.515,00
1.05.01	Badan Kesbang Linmas	28.334.427.503,00	12.009.793.000,00	16.324.634.503,00
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	27.285.839.781,00	12.082.111.381,00	15.203.728.400,00
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42.630.649.612,00	12.279.984.000,00	30.350.665.612,00
1.06	Sosial	106.662.539.060,80	68.613.519.040,80	38.049.020.020,00
1.06.01	Dinas Sosial	106.662.539.060,80	68.613.519.040,80	38.049.020.020,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	814.750.005.382,85	291.156.455.487,00	523.593.549.895,85
2.01	Tenaga Kerja	54.417.365.513,62	41.170.626.663,00	13.246.738.850,62
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	54.417.365.513,62	41.170.626.663,00	13.246.738.850,62
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.683.325.819,72	8.827.162.000,00	8.856.163.819,72
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17.683.325.819,72	8.827.162.000,00	8.856.163.819,72
2.03	Pangan	131.101.008.007,30	34.478.845.519,00	96.622.162.488,30
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	131.101.008.007,30	34.478.845.519,00	96.622.162.488,30
2.05	Lingkungan Hidup	69.284.088.626,00	24.015.210.855,00	45.268.877.771,00
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	69.284.088.626,00	24.015.210.855,00	45.268.877.771,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.536.955.808,00	10.034.211.535,00	12.502.744.273,00
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22.536.955.808,00	10.034.211.535,00	12.502.744.273,00
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32.189.846.420,00	12.035.944.000,00	20.153.902.420,00
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32.189.846.420,00	12.035.944.000,00	20.153.902.420,00
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.976.309.037,00	6.960.894.085,00	8.015.414.952,00
2.08.01	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	14.976.309.037,00	6.960.894.085,00	8.015.414.952,00
2.09	Perhubungan	61.091.988.501,78	38.564.389.000,00	22.527.599.501,78
2.09.01	Dinas Perhubungan	61.091.988.501,78	38.564.389.000,00	22.527.599.501,78
2.10	Komunikasi dan Informatika	45.884.662.255,00	19.706.272.000,00	26.178.390.255,00
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	45.884.662.255,00	19.706.272.000,00	26.178.390.255,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	51.580.945.680,00	17.310.833.000,00	34.270.112.680,00
2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	51.580.945.680,00	17.310.833.000,00	34.270.112.680,00
2.12	Penanaman Modal	28.156.947.868,00	17.362.973.000,00	10.793.974.868,00
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	28.156.947.868,00	17.362.973.000,00	10.793.974.868,00

KODE	URUSAN/SKPD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Rp)	BELANJA LANGSUNG (Rp)
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	150.285.347.880,00	17.496.280.598,00	132.789.067.282,00
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	150.285.347.880,00	17.496.280.598,00	132.789.067.282,00
2.16	Kebudayaan	99.966.673.084,43	25.588.014.232,00	74.378.658.852,43
2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	99.966.673.084,43	25.588.014.232,00	74.378.658.852,43
2.17	Perpustakaan	35.594.540.882,00	17.604.799.000,00	17.989.741.882,00
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	35.594.540.882,00	17.604.799.000,00	17.989.741.882,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	657.085.332.674,60	320.792.263.638,00	336.293.069.036,60
3.01	Kelautan dan Perikanan	77.598.195.215,20	24.872.054.400,00	52.726.140.815,20
3.01.01	Dinas Perikanan dan Kelautan	77.598.195.215,20	24.872.054.400,00	52.726.140.815,20
3.03	Pertanian	258.092.906.448,40	119.559.357.004,00	138.533.549.444,40
3.03.01	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	197.180.453.457,40	96.265.382.004,00	100.915.071.453,40
3.03.02	Dinas Perkebunan	60.912.452.991,00	23.293.975.000,00	37.618.477.991,00
3.04	Kehutanan	199.935.677.534,00	122.778.970.364,00	77.156.707.170,00
3.04.01	Dinas Kehutanan	199.935.677.534,00	122.778.970.364,00	77.156.707.170,00
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	63.922.200.084,00	19.810.520.000,00	44.111.680.084,00
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	63.922.200.084,00	19.810.520.000,00	44.111.680.084,00
3.06	Perindustrian	57.536.353.393,00	33.771.361.870,00	23.764.991.523,00
3.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57.536.353.393,00	33.771.361.870,00	23.764.991.523,00
4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.796.903.972.699,27	6.999.337.095.696,27	797.566.877.003,00
4.01	Administrasi Pemerintahan	1.184.809.521.941,00	540.186.106.138,00	644.623.415.803,00
4.01.01	DPRD	-	-	-
4.01.02	KDH & WKDH	9.908.600.873,00	9.908.600.873,00	-
4.01.03	Sekretariat Daerah	262.020.085.552,00	83.594.030.035,00	178.426.055.517,00
4.01.03.01	<i>Biro Umum dan Perlengkapan</i>	<i>181.376.748.651,00</i>	<i>83.594.030.035,00</i>	<i>97.782.718.616,00</i>
4.01.03.02	<i>Biro Pemerintahan Umum</i>	<i>17.207.888.367,00</i>	-	<i>17.207.888.367,00</i>
4.01.03.03	<i>Biro Bina Perekonomian</i>	<i>6.113.709.023,00</i>	-	<i>6.113.709.023,00</i>
4.01.03.04	<i>Biro Sosial dan Kesejahteraan</i>	<i>12.203.973.599,00</i>	-	<i>12.203.973.599,00</i>
4.01.03.05	<i>Biro Organisasi</i>	<i>7.542.304.985,00</i>	-	<i>7.542.304.985,00</i>
4.01.03.06	<i>Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama</i>	<i>6.399.258.375,00</i>	-	<i>6.399.258.375,00</i>
4.01.03.07	<i>Biro Administrasi Pembangunan</i>	<i>6.966.834.930,00</i>	-	<i>6.966.834.930,00</i>
4.01.03.08	<i>Biro Hukum</i>	<i>4.529.099.000,00</i>	-	<i>4.529.099.000,00</i>
4.01.03.09	<i>Biro Humas Pimpinan</i>	<i>19.680.268.622,00</i>	-	<i>19.680.268.622,00</i>
4.01.04	Sekretariat DPRD	393.083.636.366,00	143.138.523.100,00	249.945.113.266,00
4.01.07	Badan Penghubung Daerah	19.353.685.953,00	8.644.318.000,00	10.709.367.953,00
4.02	Pengawasan	60.886.376.116,00	26.886.376.116,00	34.000.000.000,00
4.02.01	Inspektorat Daerah Provinsi	60.886.376.116,00	26.886.376.116,00	34.000.000.000,00
4.03	Perencanaan	35.749.078.612,46	17.432.044.445,46	18.317.034.167,00
4.03.01	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	35.749.078.612,46	17.432.044.445,46	18.317.034.167,00
4.04	Keuangan	6.475.830.610.329,81	6.395.360.211.084,81	80.470.399.245,00
4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.475.830.610.329,81	6.395.360.211.084,81	80.470.399.245,00
4.04.01.01	<i>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)</i>	<i>101.510.371.038,81</i>	<i>21.039.971.793,81</i>	<i>80.470.399.245,00</i>
4.04.01.02	<i>Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)</i>	<i>6.374.320.239.291,00</i>	<i>6.374.320.239.291,00</i>	-
4.04.02	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	439.557.137.081,00	268.014.258.014,00	171.542.879.067,00
4.05	Kepegawaian	35.986.442.027,00	16.953.620.028,00	19.032.821.999,00
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah	35.986.442.027,00	16.953.620.028,00	19.032.821.999,00
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	43.179.699.351,00	19.403.055.000,00	23.776.644.351,00
4.06.01	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	43.179.699.351,00	19.403.055.000,00	23.776.644.351,00
4.07	Penelitian dan Pengembangan	21.348.620.438,00	10.002.059.000,00	11.346.561.438,00
4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	21.348.620.438,00	10.002.059.000,00	11.346.561.438,00
TOTAL		14.726.662.153.406,20	10.088.596.399.007,00	4.638.065.754.399,18

Selanjutnya uraian perubahan atas belanja tidak langsung per Organisasi Perangkat Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Plafon Anggaran Belanja Tidak Langsung Perangkat Daerah
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

KODE	URUSAN/SKPD	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.463.817.585.000,00	2.477.310.584.185,75	13.492.999.185,75
1.01	Pendidikan	1.960.288.761.000,00	1.971.655.182.644,33	11.366.421.644,33
1.01.01	Dinas Pendidikan	1.960.288.761.000,00	1.971.655.182.644,33	11.366.421.644,33
1.02	Kesehatan	167.345.889.000,00	176.862.258.407,00	9.516.369.407,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	130.140.399.000,00	135.480.684.696,00	5.340.285.696,00
1.02.02	Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. M. Ildrem	37.205.490.000,00	41.381.573.711,00	4.176.083.711,00
1.02.03	Rumah Sakit Haji Medan	-	-	-
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	209.279.430.000,00	204.319.554.045,00	(4.959.875.955,00)
1.03.01	Dinas Bina Marga dan Bina Kostruksi	83.718.092.000,00	82.719.833.605,00	(998.258.395,00)
1.03.02	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang	125.561.338.000,00	121.599.720.440,00	(3.961.617.560,00)
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19.515.155.000,00	19.488.181.667,62	(26.973.332,38)
1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	19.515.155.000,00	19.488.181.667,62	(26.973.332,38)
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	36.358.246.000,00	36.371.888.381,00	13.642.381,00
1.05.01	Badan Kesbang Linmas	12.009.793.000,00	12.009.793.000,00	-
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	12.068.469.000,00	12.082.111.381,00	13.642.381,00
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.279.984.000,00	12.279.984.000,00	-
1.06	Sosial	71.030.104.000,00	68.613.519.040,80	(2.416.584.959,20)
1.06.01	Dinas Sosial	71.030.104.000,00	68.613.519.040,80	(2.416.584.959,20)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	292.576.909.221,00	291.156.455.487,00	(1.420.453.734,00)
2.01	Tenaga Kerja	42.436.674.000,00	41.170.626.663,00	(1.266.047.337,00)
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	42.436.674.000,00	41.170.626.663,00	(1.266.047.337,00)
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.827.162.000,00	8.827.162.000,00	-
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.827.162.000,00	8.827.162.000,00	-
2.03	Pangan	34.207.398.000,00	34.478.845.519,00	271.447.519,00
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	34.207.398.000,00	34.478.845.519,00	271.447.519,00
2.05	Lingkungan Hidup	23.939.253.000,00	24.015.210.855,00	75.957.855,00
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	23.939.253.000,00	24.015.210.855,00	75.957.855,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.944.560.000,00	10.034.211.535,00	89.651.535,00
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.944.560.000,00	10.034.211.535,00	89.651.535,00

KODE	URUSAN/SKPD	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.035.804.000,00	12.035.944.000,00	140.000,00
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.035.804.000,00	12.035.944.000,00	140.000,00
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.950.253.221,00	6.960.894.085,00	10.640.864,00
2.08.01	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	6.950.253.221,00	6.960.894.085,00	10.640.864,00
2.09	Perhubungan	39.564.389.000,00	38.564.389.000,00	(1.000.000.000,00)
2.09.01	Dinas Perhubungan	39.564.389.000,00	38.564.389.000,00	(1.000.000.000,00)
2.10	Komunikasi dan Informatika	19.706.272.000,00	19.706.272.000,00	-
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.706.272.000,00	19.706.272.000,00	-
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.310.833.000,00	17.310.833.000,00	-
2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	17.310.833.000,00	17.310.833.000,00	-
2.12	Penanaman Modal	17.362.973.000,00	17.362.973.000,00	-
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	17.362.973.000,00	17.362.973.000,00	-
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	17.103.749.000,00	17.496.280.598,00	392.531.598,00
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	17.103.749.000,00	17.496.280.598,00	392.531.598,00
2.16	Kebudayaan	25.582.790.000,00	25.588.014.232,00	5.224.232,00
2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25.582.790.000,00	25.588.014.232,00	5.224.232,00
2.17	Perpustakaan	17.604.799.000,00	17.604.799.000,00	-
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	17.604.799.000,00	17.604.799.000,00	-
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	324.205.041.000,00	320.792.263.638,00	(3.412.777.362,00)
3.01	Kelautan dan Perikanan	24.856.000.000,00	24.872.054.400,00	16.054.400,00
3.01.01	Dinas Perikanan dan Kelautan	24.856.000.000,00	24.872.054.400,00	16.054.400,00
3.03	Pertanian	121.592.645.000,00	119.559.357.004,00	(2.033.287.996,00)
3.03.01	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	98.298.670.000,00	96.265.382.004,00	(2.033.287.996,00)
3.03.02	Dinas Perkebunan	23.293.975.000,00	23.293.975.000,00	-
3.04	Kehutanan	124.257.685.000,00	122.778.970.364,00	(1.478.714.636,00)
3.04.01	Dinas Kehutanan	124.257.685.000,00	122.778.970.364,00	(1.478.714.636,00)
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	19.810.520.000,00	19.810.520.000,00	-
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	19.810.520.000,00	19.810.520.000,00	-
3.06	Perindustrian	33.688.191.000,00	33.771.361.870,00	83.170.870,00
3.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	33.688.191.000,00	33.771.361.870,00	83.170.870,00
4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	7.385.666.294.539,86	6.999.337.095.696,27	(386.329.198.843,59)
4.01	Administrasi Pemerintahan	247.150.767.175,00	245.285.472.008,00	(1.865.295.167,00)
4.01.01	DPRD	-	-	-
4.01.02	KDH & WKDH	11.773.896.040,00	9.908.600.873,00	(1.865.295.167,00)
4.01.03	Sekretariat Daerah	83.594.030.035,00	83.594.030.035,00	-
4.01.03.01	<i>Biro Umum dan Perlengkapan</i>	<i>83.594.030.035,00</i>	<i>83.594.030.035,00</i>	-
4.01.03.02	<i>Biro Pemerintahan Umum</i>	-	-	-
4.01.03.03	<i>Biro Bina Perekonomian</i>	-	-	-
4.01.03.04	<i>Biro Sosial dan Kesejahteraan</i>	-	-	-
4.01.03.05	<i>Biro Organisasi</i>	-	-	-
4.01.03.06	<i>Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama</i>	-	-	-
4.01.03.07	<i>Biro Administrasi Pembangunan</i>	-	-	-
4.01.03.08	<i>Biro Hukum</i>	-	-	-
4.01.03.09	<i>Biro Humas Pimpinan</i>	-	-	-
4.01.04	Sekretariat DPRD	143.138.523.100,00	143.138.523.100,00	-
4.01.07	Badan Penghubung Daerah	8.644.318.000,00	8.644.318.000,00	-
4.02	Pengawasan	26.877.713.000,00	26.886.376.116,00	8.663.116,00
4.02.01	Inspektorat Daerah Provinsi	26.877.713.000,00	26.886.376.116,00	8.663.116,00
4.03	Perencanaan	17.410.812.471,05	17.432.044.445,46	21.231.974,41
4.03.01	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	17.410.812.471,05	17.432.044.445,46	21.231.974,41

KODE	URUSAN/SKPD	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.04	Keuangan	7.048.347.413.893,81	6.663.374.469.098,81	(384.972.944.795,00)
4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.839.871.874.068,81	6.395.360.211.084,81	(444.511.662.984,00)
4.04.01.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	21.039.971.793,81	21.039.971.793,81	-
4.04.01.02	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	6.818.831.902.275,00	6.374.320.239.291,00	(444.511.662.984,00)
4.04.02	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	208.475.539.825,00	268.014.258.014,00	59.538.718.189,00
4.05	Kepegawaian	16.885.050.000,00	16.953.620.028,00	68.570.028,00
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah	16.885.050.000,00	16.953.620.028,00	68.570.028,00
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	19.306.979.000,00	19.403.055.000,00	96.076.000,00
4.06.01	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	19.306.979.000,00	19.403.055.000,00	96.076.000,00
4.07	Penelitian dan Pengembangan	9.687.559.000,00	10.002.059.000,00	314.500.000,00
4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.687.559.000,00	10.002.059.000,00	314.500.000,00
TOTAL		10.466.265.829.760,90	10.088.596.399.007,00	(377.669.430.753,84)

Sedangkan terhadap uraian perubahan atas belanja langsung per Organisasi Perangkat Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 ini dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Plafon Anggaran Belanja Langsung Perangkat Daerah
pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

KODE	URUSAN/SKPD	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	3.163.949.485.118,68	2.980.612.258.463,72	(183.337.226.654,96)
1.01	Pendidikan	1.349.635.552.162,00	1.426.014.428.924,00	76.378.876.762,00
1.01.01	Dinas Pendidikan	1.349.635.552.162,00	1.426.014.428.924,00	76.378.876.762,00
1.02	Kesehatan	394.699.671.736,00	350.191.380.115,00	(44.508.291.621,00)
1.02.01	Dinas Kesehatan	266.438.786.469,00	237.534.099.805,00	(28.904.686.664,00)
1.02.02	Rumah Sakit Jiwa Daerah Prof. Dr. M. Ildrem	26.428.881.227,00	22.336.793.138,00	(4.092.088.089,00)
1.02.03	Rumah Sakit Haji Medan	101.832.004.040,00	90.320.487.172,00	(11.511.516.868,00)
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.140.856.818.538,68	982.815.867.142,72	(158.040.951.395,96)
1.03.01	Dinas Bina Marga dan Bina Kostruksi	817.652.179.784,00	697.415.692.602,76	(120.236.487.181,24)
1.03.02	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tataruang	323.204.638.754,68	285.400.174.539,96	(37.804.464.214,72)
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	149.263.388.685,00	121.662.533.747,00	(27.600.854.938,00)
1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	149.263.388.685,00	121.662.533.747,00	(27.600.854.938,00)
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	83.550.514.397,00	61.879.028.515,00	(21.671.485.882,00)
1.05.01	Badan Kesbang Linmas	19.553.038.322,00	16.324.634.503,00	(3.228.403.819,00)
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	29.999.868.400,00	15.203.728.400,00	(14.796.140.000,00)
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.997.607.675,00	30.350.665.612,00	(3.646.942.063,00)
1.06	Sosial	45.943.539.600,00	38.049.020.020,00	(7.894.519.580,00)
1.06.01	Dinas Sosial	45.943.539.600,00	38.049.020.020,00	(7.894.519.580,00)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	623.513.077.441,93	523.593.549.895,85	(99.919.527.546,08)
2.01	Tenaga Kerja	15.679.586.361,00	13.246.738.850,62	(2.432.847.510,38)
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja	15.679.586.361,00	13.246.738.850,62	(2.432.847.510,38)
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.149.492.540,72	8.856.163.819,72	(2.293.328.721,00)
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.149.492.540,72	8.856.163.819,72	(2.293.328.721,00)
2.03	Pangan	116.035.760.801,30	96.622.162.488,30	(19.413.598.313,00)
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	116.035.760.801,30	96.622.162.488,30	(19.413.598.313,00)
2.05	Lingkungan Hidup	56.516.752.144,00	45.268.877.771,00	(11.247.874.373,00)
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup	56.516.752.144,00	45.268.877.771,00	(11.247.874.373,00)
2.06	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.739.893.300,00	12.502.744.273,00	(2.237.149.027,00)
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.739.893.300,00	12.502.744.273,00	(2.237.149.027,00)

KODE	URUSAN/SKPD	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.134.849.425,00	20.153.902.420,00	(3.980.947.005,00)
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	24.134.849.425,00	20.153.902.420,00	(3.980.947.005,00)
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.693.292.707,00	8.015.414.952,00	(1.677.877.755,00)
2.08.01	Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah	9.693.292.707,00	8.015.414.952,00	(1.677.877.755,00)
2.09	Perhubungan	26.991.120.920,44	22.527.599.501,78	(4.463.521.418,66)
2.09.01	Dinas Perhubungan	26.991.120.920,44	22.527.599.501,78	(4.463.521.418,66)
2.10	Komunikasi dan Informatika	31.390.489.488,00	26.178.390.255,00	(5.212.099.233,00)
2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.390.489.488,00	26.178.390.255,00	(5.212.099.233,00)
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	41.441.635.291,00	34.270.112.680,00	(7.171.522.611,00)
2.11.01	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	41.441.635.291,00	34.270.112.680,00	(7.171.522.611,00)
2.12	Penanaman Modal	13.508.696.424,00	10.793.974.868,00	(2.714.721.556,00)
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	13.508.696.424,00	10.793.974.868,00	(2.714.721.556,00)
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	155.961.378.296,00	132.789.067.282,00	(23.172.311.014,00)
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olah Raga	155.961.378.296,00	132.789.067.282,00	(23.172.311.014,00)
2.16	Kebudayaan	84.794.937.596,47	74.378.658.852,43	(10.416.278.744,04)
2.16.01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	84.794.937.596,47	74.378.658.852,43	(10.416.278.744,04)
2.17	Perpustakaan	21.475.192.147,00	17.989.741.882,00	(3.485.450.265,00)
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Arsip	21.475.192.147,00	17.989.741.882,00	(3.485.450.265,00)
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	397.851.191.124,03	336.293.069.036,60	(61.558.122.087,43)
3.01	Kelautan dan Perikanan	63.643.911.237,63	52.726.140.815,20	(10.917.770.422,43)
3.01.01	Dinas Perikanan dan Kelautan	63.643.911.237,63	52.726.140.815,20	(10.917.770.422,43)
3.03	Pertanian	166.777.539.026,40	138.533.549.444,40	(28.243.989.582,00)
3.03.01	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	120.057.887.941,40	100.915.071.453,40	(19.142.816.488,00)
3.03.02	Dinas Perkebunan	46.719.651.085,00	37.618.477.991,00	(9.101.173.094,00)
3.04	Kehutanan	84.705.708.520,00	77.156.707.170,00	(7.549.001.350,00)
3.04.01	Dinas Kehutanan	84.705.708.520,00	77.156.707.170,00	(7.549.001.350,00)
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	54.462.155.054,00	44.111.680.084,00	(10.350.474.970,00)
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	54.462.155.054,00	44.111.680.084,00	(10.350.474.970,00)
3.06	Perindustrian	28.261.877.286,00	23.764.991.523,00	(4.496.885.763,00)
3.06.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.261.877.286,00	23.764.991.523,00	(4.496.885.763,00)
4	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	892.328.181.140,50	797.566.877.003,00	(94.761.304.137,50)
4.01	Administrasi Pemerintahan	474.220.391.061,50	439.080.536.736,00	(35.139.854.325,50)
4.01.01	DPRD	-	-	-
4.01.02	KDH & WKDH	-	-	-
4.01.03	Sekretariat Daerah	211.602.598.969,50	178.426.055.517,00	(33.176.543.452,50)
4.01.03.01	<i>Biro Umum dan Perlengkapan</i>	<i>126.376.900.607,50</i>	<i>97.782.718.616,00</i>	<i>(28.594.181.991,50)</i>
4.01.03.02	<i>Biro Pemerintahan Umum</i>	<i>12.070.792.987,00</i>	<i>17.207.888.367,00</i>	<i>5.137.095.380,00</i>
4.01.03.03	<i>Biro Bina Perekonomian</i>	<i>7.777.488.551,00</i>	<i>6.113.709.023,00</i>	<i>(1.663.779.528,00)</i>
4.01.03.04	<i>Biro Sosial dan Kesejahteraan</i>	<i>14.534.395.793,00</i>	<i>12.203.973.599,00</i>	<i>(2.330.422.194,00)</i>
4.01.03.05	<i>Biro Organisasi</i>	<i>6.825.606.685,00</i>	<i>7.542.304.985,00</i>	<i>716.698.300,00</i>
4.01.03.06	<i>Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama</i>	<i>7.616.898.395,00</i>	<i>6.399.258.375,00</i>	<i>(1.217.640.020,00)</i>
4.01.03.07	<i>Biro Administrasi Pembangunan</i>	<i>9.064.892.529,00</i>	<i>6.966.834.930,00</i>	<i>(2.098.057.599,00)</i>
4.01.03.08	<i>Biro Hukum</i>	<i>5.412.453.300,00</i>	<i>4.529.099.000,00</i>	<i>(883.354.300,00)</i>
4.01.03.09	<i>Biro Humas Pimpinan</i>	<i>21.923.170.122,00</i>	<i>19.680.268.622,00</i>	<i>(2.242.901.500,00)</i>
4.01.04	Sekretariat DPRD	249.947.980.291,00	249.945.113.266,00	(2.867.025,00)
4.01.05	Badan Penghubung Daerah	12.669.811.801,00	10.709.367.953,00	(1.960.443.848,00)
4.02	Pengawasan	38.000.000.000,00	34.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)
4.02.01	Inspektorat Daerah Provinsi	38.000.000.000,00	34.000.000.000,00	(4.000.000.000,00)
4.03	Perencanaan	22.205.960.447,00	18.317.034.167,00	(3.888.926.280,00)
4.03.01	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	22.205.960.447,00	18.317.034.167,00	(3.888.926.280,00)

KODE	URUSAN/SKPD	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH/ BERKURANG
4.04	Keuangan	293.184.890.643,00	252.013.278.312,00	(41.171.612.331,00)
4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	91.189.532.245,00	80.470.399.245,00	(10.719.133.000,00)
4.04.01.01	<i>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)</i>	<i>91.189.532.245,00</i>	<i>80.470.399.245,00</i>	<i>(10.719.133.000,00)</i>
4.04.01.02	<i>Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)</i>	-	-	-
4.04.02	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	201.995.358.398,00	171.542.879.067,00	(30.452.479.331,00)
4.05	Kepegawaian	22.542.130.664,00	19.032.821.999,00	(3.509.308.665,00)
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah	22.542.130.664,00	19.032.821.999,00	(3.509.308.665,00)
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	28.371.938.067,00	23.776.644.351,00	(4.595.293.716,00)
4.06.01	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia	28.371.938.067,00	23.776.644.351,00	(4.595.293.716,00)
4.07	Penelitian dan Pengembangan	13.802.870.258,00	11.346.561.438,00	(2.456.308.820,00)
4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.802.870.258,00	11.346.561.438,00	(2.456.308.820,00)
TOTAL		5.077.641.934.825,14	4.638.065.754.399,17	(439.576.180.425,97)

Sedangkan rincian Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung yang mengalami perubahan adalah sebagaimana tabel 3-4 berikut ini.

Tabel 3-4
Plafon Anggaran Sementara untuk belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)	Bertambah/Berkurang (Rp.)
1	Belanja Pegawai	3.647.433.927.485,86	3.714.276.159.716,02	66.842.232.230,16
2	Belanja Hibah	2.968.196.113.522,00	2.996.523.871.200,00	28.327.757.678,00
3	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	3.818.395.036.753,00	3.345.467.946.191,00	(472.927.090.562,00)
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	7.240.752.000,00	7.328.421.900,00	87.669.900,00
5	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-
	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	10.466.265.829.760,90	10.088.596.399.007,00	(377.669.430.753,84)

- 1) Perubahan terhadap alokasi Belanja Pegawai adalah terdapat pada :
 - a) Gaji dan tunjangan PNS, KDH/WKDH dan DPRD mengalami pertambahan sebesar Rp. 38.871.046.010,62 dengan memperhitungkan pengalokasian gaji dan tunjangan 1.028 orang CPNS penerimaan Formasi Tahun 2018 yang terdiri dari 701 guru dan 327 non guru, mengalokasikan Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tunjangan Khusus Guru PNSD dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari sisa transfer pemerintah pusat yang belum disalurkan dan dicatat sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2018.

- b) Tambahan penghasilan PNSD mengalami pertambahan sebesar Rp.571.679.490,54 yaitu antara lain untuk memperhitungkan belanja Tambahan Penghasilan PNS Daerah bagi 327 orang CPNS Formasi Tahun 2018, dimana untuk guru tidak diberikan tambahan penghasilan.
 - c) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH mengalami pengurangan sebesar Rp. 1.865.330.167,00. Pengurangan dimaksud disebabkan karena penyesuaian atas Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH dengan target Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan.
 - d) Insentif Pemungutan Pajak Daerah mengalami pertambahan sebesar Rp. 29.264.836.896,00 dengan menyesuaikan atas target potensi pajak daerah.
- 2) Belanja Hibah
- Belanja Hibah mengalami pertambahan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari sisa transfer pemerintah pusat yang belum disalurkan dan dicatat sebagai SiLPA Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.27.327.757.678,00 sedangkan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi mengalami pertambahan sebesar Rp.1.000.000.000,00.
- 3) Belanja Dana Bagi Hasil Provinsi kepada Kab/Kota
- Belanja Dana bagi hasil provinsi kepada kab/kota pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 mengalami pengurangan sebesar Rp.472.927.090.562,00 akibat tidak tercapainya potensi Pajak Air Permukaan yang bersumber dari PT. Inalum.
- 4) Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kab/Kota dan Partai Politik
- Belanja Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kab/Kota dan Partai Politik pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 mengalami pertambahan sebesar Rp.87.669.900,00 yaitu pertambahan untuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- 4) Belanja Dana Tidak Terduga
- Belanja Dana Tidak Terduga tidak mengalami perubahan yaitu masih sebesar Rp. 25.000.000.000,00.

Sedangkan rincian Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung dari SKPD menurut program dan kegiatan yang mengalami perubahan baik akibat adanya pergeseran anggaran, penambahan anggaran maupun pengurangan anggaran yang disajikan sebagaimana Tabel 3-5 pada Lampiran.

BAB IV
PENUTUP

Adapun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan kerja Perangkat Daerah secara indikatif sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP-SKPD).

Demikianlah Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 ini disampaikan untuk selanjutnya menjadi bahan pembahasan dalam rangka penentuan alokasi anggaran indikatif dalam Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 yang terlebih dahulu disepakati bersama dalam bentuk Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019.

Medan, 22 Juli 2019

GUBERNUR SUMATERA UTARA

selaku,
PIHAK PERTAMA


EDY RAHMAYADI

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

selaku,
PIHAK KEDUA


H. WAGIRIN ARMAN, S.Sos
KETUA

RUBEN TARIGAN, SE
WAKIL KETUA

H. T. MILWAN
WAKIL KETUA


SRI KUMALA, SE, MM
WAKIL KETUA

ADDHOT SIMAMORA
WAKIL KETUA